



HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN KOMPOSISI PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BALI

Shabrina Umi Rahayu, Surya Dewi[✉]

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2013; Accepted: 2013 ; Published: September 2013

Abstract

This study aimed to determine the relationship changes in the composition of the population by age, employment status, field of work, gender and type of work in encouraging regional development, especially in the Bali Province. This research is a descriptive study based on an analysis of current phenomena. The results showed that the variables of age, employment status, field of work, gender and type of work to encourage regional development, especially in Bali Province. This results implied that the development policy will be applied must be able to adjust to the conditions of the population or society.

Keywords: composition of the population , local development , descriptive

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan komposisi penduduk yang dilihat berdasarkan umur, status pekerjaan, lapangan usaha, jenis kelamin dan jenis pekerjaan dalam mendorong pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang didasarkan pada analisis terhadap fenomena terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel umur, status pekerjaan, lapangan usaha, jenis kelamin dan jenis pekerjaan mendorong pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan yang akan diterapkan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi penduduk atau masyarakatnya.

Kata Kunci: komposisi penduduk, pembangunan daerah, deskriptif

How to Cite: Shabrina Umi Rahayu, Surya Dewi (2013). Hubungan Antara Perubahan Komposisi Penduduk Dan Pembangunan Daerah Di Provinsi Bali. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2013 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Penduduk menjadi suatu bagian yang terpenting dalam penentuan keberhasilan pembangunan di setiap Negara. Pembangunan ekonomi sangat sulit untuk diprediksi. Ketidakpastian dalam pertumbuhan output, inflasi dan pengangguran (Little & Triest, 2013). Penduduk dapat menjadi objek sekaligus subjek pembangunan, karena itu penduduk merupakan sasaran dari pembangunan dan juga sebagai pelaku dalam pembangunan. Penduduk memiliki peranan penting sekaligus merupakan modal besar pembangunan apabila sumber daya yang dimiliki dapat di manfaatkan serta diberdayakan secara optimal. Melalui adanya penyediaan informasi mengenai gambaran kondisi kependudukan, tentunya akan dapat mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan (BPS, 2007).

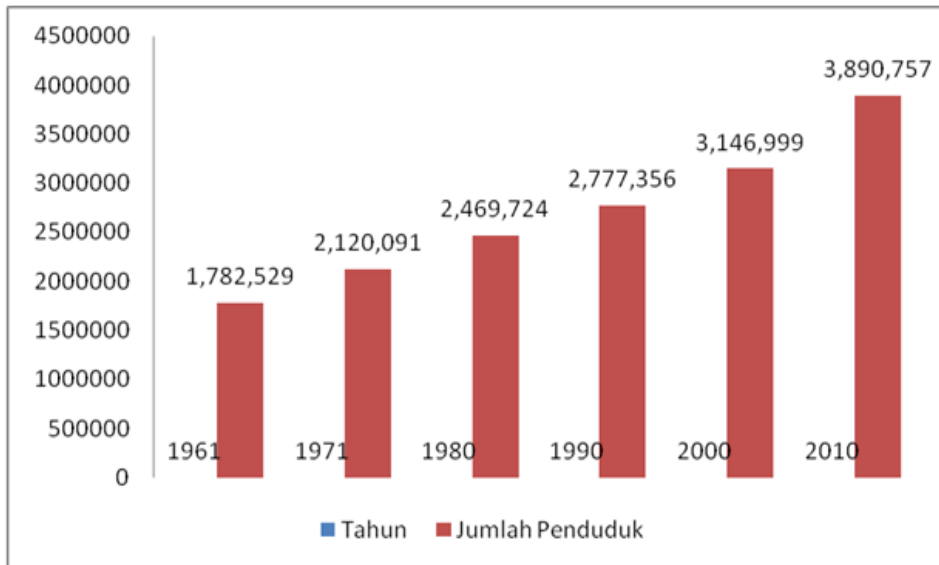
Pada tingkat global, jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat krusial dalam masalah konsumsi sumber daya alam (Van Braeckel et al, 2012). Data pada satu dekade terakhir menunjukkan bahwa produksi sumber daya alam dunia telah meningkat, pertumbuhan penduduk ditopang oleh produksi sumber daya alam yang lebih tinggi yang diubah menjadi barang-barang jadi (final goods) dan jasa (Mursa, 2012). Pada dekade-dekade berikutnya umat manusia akan menuntut lebih banyak makanan dari sumber daya yang akan bertambah lebih sedikit (Schneider et al, 2011).

Kependudukan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan dalam segi sosial maupun ekonomi. Perubahan memberikan kesan serta gambaran bagaimana kondisi dari daerah tersebut. Kependudukan amatlah sensitif terhadap perubahan-perubahan disekitarnya, seperti perubahan yang berasal dari lingkungan, pembangunan, tenaga kerja, social maupun ekonomi. Kondisi kependudukan memberikan gambaran bagaimana arah pembangunan terhadap suatu daerah. Indonesia memiliki 33 Provinsi dimana Bali merupakan salah satu dari 33 Provinsi yang terkenal dengan sektor pariwisatanya.

Banyak pendatang tourist mancanegara bahkan penduduk dari berbagai macam belahan dunia. Fokus permasalahan di setiap belahan dunia adalah penduduk. Secara demografi jumlah penduduk Bali berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yaitu sebanyak 3.890.757 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan Sensus sebelumnya yaitu sebanyak 3.378.092. Berarti kurang lebih sekitar 512.665 jiwa meningkat dalam kurun waktu 10 tahun (BPS, 2010). Hal tersebut dapat di lihat melalui grafik dalam Gambar 1,

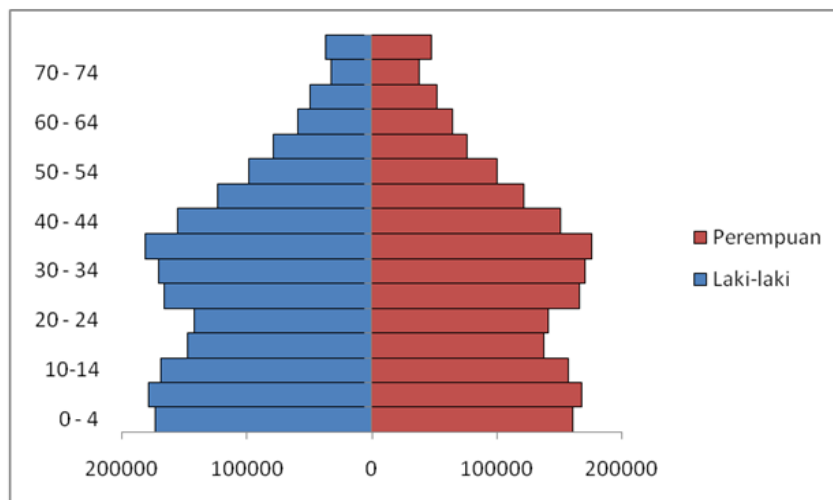
Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk provinsi Bali selalu mengalami peningkatan yang signifikan, namun cukup tinggi untuk di tahun terakhir yang mencapai kurang lebih sebanyak 19 persen bila dibandingkan di tahun 2000 yang berkisar di angka 11 persen. Kenaikan jumlah penduduk ini akan memberikan dampak secara nyata bagi masyarakat khususnya bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan jumlah penduduk, komposisi penduduk dari segi demografi di kalisifikasikan menurut umur dan jenis kelamin seperti pada piramida pada Gambar 2.

Komposisi penduduk berdasarkan umur berubah di setiap tahunnya selama 10 tahun. Pada tahun 1980 penduduk dengan umur 10-14 tahun jauh lebih dominan. Pada saat itu banyak penduduk yang tergolong usia muda, apabila separuh dari mereka pada usia emasnya diasuh oleh pembantu atau anggota keluarga lainnya jika selain orangtua karena di tinggal ibunya bekerja, kemungkinan besar apa yang dikhawatirkan Fukuyama akan terbukti yaitu terjadinya guncangan besar The Great Distruption (Sopari, 2013). Guncangan besar merupakan sebuah kondisi ketidakteraturan, dan disharmoni. Menurut Fukuyama guncangan besar ini ditandai oleh meningkatnya secara drastis sejumlah patologi sosial seperti kejahatan (kriminalitas), perceraian, dan kehancuran kehidupan rumah tangga. Komposisi penduduk di 10 tahun kemudian pada tahun 1990 dengan umur 15-19 tahun tertinggi jika dibandingkan dengan umur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya usia produktif yang ada



Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Bali Hasil Sensus Penduduk

Sumber : BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sensus)



Gambar 2. Piramida Penduduk berdasarkan komposisi Umur dan Jenis Kelamin hasil Sensus Penduduk Provinsi Bali

Sumber : BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sensus)

di tahun tersebut. Remaja yang belum menikah masih rendah akan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi maka dari itu ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu validitas informasi yang diperoleh dan kuatnya peranan orangtua maupun guru yang memiliki peranan penting dalam membicarakan masalah kesehatan reproduksi (Howden & Mayer, 2011).

Penduduk usia reproduksi dalam demografi secara biologis memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan (Sopari, 2013),

di tahun 2000 penduduk dengan usia 20-24 tahun meningkat, banyaknya usia yang masih tergolong masa reproduksi memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan Bali. Kondisi ini mendapati angka yang besar maka pertumbuhan penduduk akan besar dalam kelompok usia ini yang pada akhirnya dapat menimbulkan ledakan bayi atau Baby Boom Population (Howden & Mayer, 2011). Kondisi umur tersebut merupakan saat yang paling rentan bagi anak usia remaja. Pada umur yang

masih tergolong rentan, apabila tidak di berikan pengontrolan secara ketat maka akan banyak timbul kriminalitas, kejahatan bahkan pornografi yang saat ini marak di kalangan usia tersebut. Berdasarkan gambar piramida 2 tahun 2010 peningkatan umur di 35-39 tahun menjelaskan bahwa banyak usia dewasa yang paling produktif dari segi ekonomi. Peningkatan ini dikenal sebagai "bonus demografi" dimana akan memungkinkan peningkatan kadar perkembangan ekonomi dan taraf hidup daerah tersebut (Mahadi, 2013).

Komposisi umur ini tentunya di pengaruhi oleh penduduk laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya penduduk laki-laki jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk wanita, apabila komposisi penduduk wanita jauh lebih besar di bandingkan dengan laki-laki tentunya hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk wanita maka kemungkinan untuk padatnya jumlah penduduk semakin besar, karena wanita merupakan memiliki alat reproduksi yang dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam erangsang pertumbuhan ekonomi (Supartoyo et al, 2013) . Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan tentunya akan menimbulkan pengangguran. Setiap sektor tentunya akan menyerap tenaga kerja dengan jumlah serta keperluannya masing-masing. Sektor yang paling dominan di geluti oleh masyarakat adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi tumpuan masyarakat khususnya golongan masyarakat kebawah, dengan terpenuhinya lahan produktif yang dapat di kembangkan membuat masyarakat semakin leluasa dalam mengembangkan usaha taninya. Seiring berjalannya waktu perubahan tersebut akan terjadi. Pergeseran sektor dari pertanian kini menuju sektor perdagangan.

Perubahan ini dapat dipengaruhi

oleh kondisi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat mempengaruhi struktur ekonomi daerahnya. Apabila sebelumnya banyak terdapat lahan sawah, perubahan membuat terkikisnya lahan produktif yang kemudian di gantikan oleh banyaknya bangunan –bangunan baru yang dijadikan oleh masyarakat sebagai lapangan usaha pribadinya. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi pembangunan daerah. Lahan produktif yang berkurang menjadikan sumber pangan semakin berkurang dengan sendirinya. Ini dapat terjadi karena sulitnya masyarakat tani mengembangkan kebutuhan pokok untuk dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua ini apabila tidak di berjalan dengan seimbang maka akan terjadi ketimpangan dari setiap pihak, hinngga pada akhirnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Perubahan sektor ini dapat di jelaskan melalui tabel 1. dengan pembagian jumlah penduduk Provinsi Bali berdasarkan lapangan usaha.

Dari kurun waktu selama empat tahun 2007 sampai dengan 2010 sektor pertanian, perkebunan kehutanan serta perikanan di Bali masih mendominasi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pekerja di Provinsi Bali paling sedikit terserap di sektor listrik, gas dan air . Di tahun tersebut kondisi struktur ekonomi penduduk Bali masih terfokus pada sektor pertanian.

Seiring berjalannya waktu di periode 2 tahun kedepan, masyarakat Bali mulai beralih kepada sektor perdagangan, rumah makan serta hotel. Hal ini mengingat bahwa arah perkembangan ekonomi penduduk Bali berbasis pariwisata. Perubahan struktur ekonomi ini memberikan dampak terhadap semakin berkurangnya lahan produktif bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, karena pada umumnya masyarakat dalam golongan ini berpegang penuh terhadap sektor pertanian. Dari 9 sektor tersebut di dalamnya tergolong 2 kelompok status pekerjaan yaitu formal dan informal. Status pekerja yang tergolong formal terdiri dari :

- (1) mereka yang berusaha dengan dibantu

buruh tetap; (2) buruh/karyawan. Status pekerjaan yang tergolong informal terdiri dari: (1) mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain; (2) mereka yang berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap; (3) pekerja keluarga (Marhaeni & Dewi, 2004:78).

Berdasarkan hasil Susenas terlihat bahwa pekerja di Provinsi Bali lebih banyak terserap pada pekerjaan dengan status pekerjaan pada kategori informal. Hal ini disebabkan tingginya angka status pekerjaan dalam kategori berusaha di bantu buruh tidak tetap. Status pekerjaan yang paling sedikit dimiliki oleh pekerja adalah berusaha dibantu dengan buruh tetap. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki usaha/ pengusaha dengan status formal yang jumlahnya cenderung sedikit, karena untuk menjadi seorang pengusaha

membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan menjadi karyawan/ buruh maupun pekerjaan dengan status pekerjaan lainnya. Dari data pada tabel 2. yang telah dipersentasekan dapat dilihat bahwa pekerja yang tergolong kategori pekerja dengan status formal kurang lebih sebanyak 35 persen sedangkan sisanya jauh lebih banyak dalam kategori informal yang mencapai 65 persen. Dapat dilihat tingginya pekerja di Provinsi Bali terlihat dalam pekerjaan dengan status informal, maka dapat diperkirakan kondisi penghasilan sebagian besar pekerja tersebut.

Pekerjaan di sektor informal pada umumnya melibatkan mereka dengan pendidikan yang relatif rendah, keterampilan rendah, sehingga cenderung penghasilan pekerja di sektor informal juga relatif rendah. Banyaknya persentase pekerja yang mengandalkan hidupnya di sektor

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2007 – 2012

Lapangan Usaha	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	714.091	726.287	704.282	672.204	556.615	572.685
Pertambangan & Penggalian		12.180	8.156	7.042	12.635	7.637
Industri Pengolahan	289.108	263.331	293.853	303.589	290.132	311.225
Listrik, Gas, dan Air		7.760	6.838	3.952	6.859	6.347
Bangunan		140.102	142.370	144.641	185.705	185.764
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	462.517	481.818	488.976	571.274	596.527	625.302
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi		92.742	85.991	95.202	81.744	85.711
Keuangan, Asuransi, & Usaha Sewa dan Penyewaan Bangunan		45.454	46.185	58.832	8.321	83.876
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	244.977	260.056	279.035	321.222	391.376	390.161
Lainnya			1.432			
Jumlah	1.982.134	2.029.730	2.057.118	2.177.358	2.204.874	2.268.708

Sumber: BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sakernas 2007-2012)

Tabel 2. Jumlah Pekerja menurut Status Pekerjaan Tahun 2007-2012 di Provinsi Bali

Status dalam Pekerjaan Utama	Tahun					
	2007 (Orang)	2008 (Orang)	2009 (Orang)	2010 (Orang)	2011 (Orang)	2012 (Orang)
Berusaha sendiri	354.175	327.445	387.377	362.314	314.767	294.888
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Tidak Dibayar	412.294	488.184	439.243	443.558	415.916	366.233
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	55.857	50.839	59.588	58.437	79.623	91.041
Buruh/Karyawan / Pegawai	639.778	597.034	595.301	720.092	881.064	974.008
Pekerja Bebas Perta- nian	62.670	56.774	71.683	64.497	28.549	59.996
Pekerja Bebas Non Pertanian	92.114	119.913	113.610	141.438	161.380	149.531
Pekerja Tak Dibayar	365.246	389.541	390.316	387.022	323.575	333.011
Jumlah	1.982.134	2.029.730	2.057.118	2.177.358	2.204.874	2.268.708

Sumber: BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sakernas 2007-2012)

informal, maka masyarakat yang menjadi tanggungan dari pekerja sektor informal tersebut juga cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan tanggungan mereka yang terlibat di sektor formal. Tidaklah heran jika ahli ketenagakerjaan menyatakan bahwa sektor informal merupakan katup pengaman bagi perekonomian Indonesia keluarga (Marhaeni & Dewi ,2004:79). Pengelompokan berdasarkan status pekerjaan dapat lebih spesifik dijelaskan pekerja yang berdasarkan jenis jabatan. Secara Internasional sudah diklasifikasikan secara baku mengenai jenis jabatan yang terbuat dalam ISCO (Marhaeni & Dewi,2004:82). Di Indonesia klasifikasi jenis jabatan ini disebut dengan KJI (Klasifikasi Jabatan Indonesia). KJI membagi jenis jabatan menjadi 8 golongan.

Dilihat melalui Tabel 3, 8 golongan jenis jabatan terbagi lagi menjadi 2 kelompok yaitu tenaga kerja kantoran dan tenaga kerja kasar. Selama periode 4 tahun dari tahun 2007 hingga 2010 jenis jabatan dengan golongan usaha pertanian masih tetap jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan jenis jabatan lainnya. Hal ini

menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang berkecimpung di dalam bidang tersebut. Pada tahun 2011 hingga tahun terakhir 2012 jenis jabatan pertanian mulai bergeser kearah tenaga produksi, angkutan, operator alat-alat dan pekerja kasar. Pergeseran jenis jabatan ini menunjukkan di tahun tersebut kondisi perekonomian Bali lebih mengarah pada konstruksi yang dimana banyak terdapat pembangunan daerah yang melibatkan pekerja kasar. Pembangunan akan suatu daerah tentunya dipengaruhi oleh penduduk. Komposisi penduduk yang dapat berjalan dengan seimbang maka akan semakin mudah untuk mengarahkan bagaimana seharusnya bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Bali merupakan kawasan pariwisata yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pembangunan daerahnya. Pertambahan jumlah penduduk dalam segala usia serta jenis kelamin akan sangat mempengaruhi bagaimana arah pertumbuhan baik dari segi ekonomi, SDM, sosial bahkan budaya, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam

Tabel 3. Jumlah Pekerja menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Tahun 2007-2012 di Provinsi Bali

Jenis Pekerjaan/ Jabatan	Tahun					
	2007 (Jiwa)	2008 (Jiwa)	2009 (Jiwa)	2010 (Jiwa)	2011 (Jiwa)	2012 (Jiwa)
Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain	100.476	105.369	95.282	148.569	149.884	161.617
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	13.901	22.538	25.028	27.187	39.283	39.628
Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha	126.260	120.585	117.263	162.061	160.153	174.831
Tenaga Usaha Penjualan	32.317	352.395	339.736	374.368	408.049	418.069
Tenaga Usaha Jasa	136.024	136.754	147.383	168.316	182.302	183.741
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan,Perburuan dan Perikanan	709.155	723.177	700.538	667.557	551.145	561.532
Tenaga Produksi, Operator Alat-alat, Angkutan dan Pekerja Kasar	559.067	552.240	613.040	608.431	685.110	696.722
Lainnya	12.934	16.672	18.848	20.869	28.948	32.568
Jumlah	1.982.134	2,029,730	2,057,118	2,177,358	2,204,874	2,268,708

Sumber : BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sakernas 2007-2012)

kependudukan.

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasikan menurut, (1) karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur dan jumlah anak, (2) karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan. (3) karakteristik Ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan, (4) karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan – pedesaan, provinsi dan kabupaten (Adieutomo & Samosir, 2010:22). definisi kependudukan antara lain Ananta (1993:22) yaitu: kependudukan, studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan (asosiasi) antara perubahan

penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan dan lain sebagainya.

Definisi kependudukan menurut Ananta tersebut menunjukkan setidaknya terdapat dua variabel yang terkait dengan kependudukan yaitu yang pertama, variabel demografi yaitu mortalitas (mortality), fertilitas (fertility) dan migrasi (migration) yang saling mempengaruhi terhadap jumlah, komposisi, persebaran penduduk. Yang kedua, variabel non demografi yang dimaksud misalnya pendidikan, pendapatan penduduk, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, kependudukan sebagai studi (Population studies) memberikan informasi yang lebih komperhensif mengenai sebab-akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi. Kependudukan sebagai sebuah multidisiplin ilmu

(studies) yang memfokuskan pada berbagai persoalan kehidupan manusia menunjukkan space kependudukan yang sangat luas. Keluasan studi kependudukan memungkinkan untuk memberikan penjelasan fenomena sosial, budaya, ekonomi, ketahanan, lingkungan fisik yang dihadapi oleh penduduk baik dalam wilayah pedesaan pertanian, pesisir maupun perkotaan.

Menurut karakteristik ekonomi, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Menurut kegiatan dalam seminggu yang lalu, penduduk berumur 10 tahun + dapat dikelompokkan menjadi bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus (Adieutomo & Samosir, 2010:27).

Demografi dapat diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Menurut Bogue (1970) dalam Adieutomo & Samosir (2010) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahan sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Shryock dan Siegel (1976) dalam Adieutomo & Samosir (2010) membagi pembagian demografi dalam artian yang sempit dan luas. Pengertian secara sempit, disebut sebagai Formal Demography, menekankan pada masalah jumlah, distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Sementara itu, dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk, termasuk di dalamnya budaya, sosial dan ekonomi. Masalah kependudukan harus mendapatkan perhatian yang lebih besar pengambil kebijakan, apalagi

pertumbuhan penduduk dunia semakin bertambah setelah tahun 1980-an (Headey and Hodge, 2009).

Distribusi umur penduduk dalam analisis demografi dikenal pula struktur umur penduduk, dalam analisis demografi di kenal pula struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi 3 kelompok besar yaitu sebagai berikut, (1) penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 th, (2) penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15 - 59 th. (3) penduduk usia lanjut, yaitu penduduk 60 th + (mengikuti ketentuan WHO) (Adieutomo & Samosir, 2010:23).

Pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan stake holders disuatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif atau wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian dalam jangka panjangnya pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Susilo:2013).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan Pendapatan Wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi di daerah tersebut (tanah, modal, teknologi) tetapi selain balas jasa tersebut juga ditentukan oleh transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat dana dari luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan pertambahan output harus lebih besar dari pada pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan latar belakang masalah

yang diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana hubungan perubahan komposisi penduduk yang dikaitkan dengan pembangunan daerah Provinsi Bali ?. Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana hubungan yang terjadi akibat dari adanya perubahan komposisi penduduk, khususnya bagi pembangunan terhadap suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang mengaitkan hubungan perubahan komposisi penduduk yang dilihat berdasarkan umur, status pekerjaan, lapangan usaha, jenis kelamin dan jenis pekerjaan terhadap pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel Umur dan Jenis Kelamin

Umur adalah satuan waktu yang digunakan untuk mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk agar nantinya dapat diketahui seberapa lama suatu benda atau makhluk tersebut dapat hidup. Umur dapat digunakan untuk mengukur kondisi fisik seseorang. Apabila umur seseorang semakin tua maka kondisi fisiknya pun akan mulai menurun. Produktivitas seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur. Umumnya seseorang yang berada pada umur produktif akan mampu memperoleh pendapatan yang lebih banyak jika di bandingkan dengan seseorang yang termasuk umur non produktif. Struktur umur akan mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan (Setiawina & Putri, 2013).

Penduduk Bali menempati urutan ke 16 di antara 33 Provinsi yang berada di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa provinsi Bali masih menduduki posisi ditengah-tengah dalam kategori penduduk

padat. Apabila angka tersebut tidak dikendalikan , maka untuk kedepannya dapat terjadi kepadatan penduduk yang menyebabkan ledakan penduduk. Penduduk di Provinsi Bali dihuni dengan persentase terbanyak pada usia 35-39 tahun yang mencapai angka 9,2 persen dan usia 70-74 Tahun sebanyak 2,7 persen mereupaka persentase terendah.

Variabel Jenis Pekerjaan dan Jabatan

Jenis pekerjaan / jabatan merupakan macam pekerjaan yang di berikan kepada seseorang atau ditugaskan kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya (BPS, 2010). Jenis Pekerjaan/ jabatan merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan arah pembangunan melalui tenaga terampil yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Jenis pekerjaan jabatan dapat dikelompokkan menjadi tiga yang pertama, pekerja terampil yang meliputi tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan serta pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha.

Pekerja terampil jenis ini diasumsikan memiliki produktivitas paling tinggi. Kedua, pekerja setengah terampil meliputi tenaga usaha penjualan jasa. Pekerja ini diasumsikan mempunyai produktivitas kerja cukup atau lebih rendah dibandingkan kelompok pekerja terampil. Ketiga, pekerja tidak terampil meliputi tenaga usaha pertanian, tenaga produksi dan pekerja kasar. Jenis pekerja kelompok ini diasumsikan memiliki produktivitas paling rendah dari dua kelompok sebelumnya (BPS, 2010)

Penduduk yang bekerja di Bali lebih dominan pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, tenaga produksi dan pekerja kasar jumlahnya mencapai 55,5 persen, angka ini menunjukkan hampir setengah dari mereka yang berada dalam jenis pekerjaan tidak terampil. Sedangkan jenis pekerjaan tenaga profesional, kepemimpinan dan tata usaha hanya berjumlah 16,5 persen. Sementara itu pekerja setengah terampil seperti tenaga usaha penjualan dan jasa sebanyak 26,5 persen.

Variabel Jumlah Pekerja menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dianggap penting sebagai indikator dalam ketenagakerjaan. Melalui indikator ini dapat melihat komposisi pekerja berdasarkan status pekerjaannya. Dari komposisi tersebut dapat ditentukan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai.

Penduduk yang bekerja di Bali

lebih banyak terserap ke sektor informal angkanya mencapai 53,1 persen. Pekerja sektor informal meliputi berusaha sendiri, berusaha di bantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja tak dibayar. Sebaliknya sektor formal menyerap tenaga kerja sebanyak 46,9 persen.

Variabel Lapangan Usaha

Tabel 4. Penduduk di Bali berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Laki-laki	Perempuan	%
0 - 4	173,522	161,169	8.8
5-9	178,836	167,662	9.1
10-14	168,541	157,493	8.6
15 - 19	147,446	137,553	7.5
20 - 24	141,707	141,180	7.2
25 - 29	165,904	166,501	8.5
30 - 34	170,956	170,635	8.7
35 - 39	181,063	176,234	9.2
40 - 44	155,377	150,759	7.9
45 - 49	123,469	121,257	6.3
50 - 54	98,337	100,119	5.0
55 - 59	78,666	76,254	4.0
60 - 64	58,801	64,413	3.0
65 - 69	49,199	52,102	2.5
70 - 74	32,460	38,148	1.7
75+	37,061	47,930	1.9
TT	3	0	0.0
Jumlah	1,961,348	1,929,409	100

Sumber : BPS (Sensus Penduduk 2010)

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Jabatan

Jenis Pekerjaan/Jabatan		%
Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain	161,617	7.1
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	39,628	1.7
Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha	174,831	7.7
Tenaga Usaha Penjualan	418,069	18.4
Tenaga Usaha Jasa	183,741	8.1
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	561,532	24.8
Tenaga Produksi, Operator Alat-alat, Angkutan dan Pekerja Kasar	696,722	30.7
Lainnya	32,568	1.4
Jumlah	2,268,708	100

Sumber: BPS Provinsi Bali (berdasarkan hasil Sakernas)

Tabel 6. Jumlah penduduk menurut Status Pekerjaan

Status dalam Pekerjaan Utama		%
Berusaha sendiri	294,888	13.0
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	366,233	16.1
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	91,041	4.0
Buruh/Karyawan /Pegawai	974,008	42.9
Pekerja Bebas Pertanian	59,996	2.6
Pekerja Bebas Non Pertanian	149,531	6.6
Pekerja Tak Dibayar	333,011	14.7
Jumlah	2,268,708	100

Sumber : BPS (Sakernas)

Tabel. 7 Jumlah Penduduk berdasarkan Lapangan Usaha

Jenis Lapangan Usaha		%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	572,685	25.2
Pertambangan & Penggalian	7,637	0.3
Industri Pengolahan	311,225	13.7
Listrik, Gas, dan Air	6,347	0.3
Bangunan	185,764	8.2
Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	625,302	27.6
Angkutan, Pergudangan tersebut, dan Komunikasi	85,711	3.8
Keuangan, Asuransi, & Usaha Pesewaan Bangunan	83,876	3.7
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	390,161	17.2
Lainnya		x
Jumlah	2,268,708	100.0

Sumber : BPS Provinsi Bali (Berdasarkan hasil Sakernas)

Bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan usaha terbagi menjadi 9 sektoryaitusektorPertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik gas dan air, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa kemasyarakatan. Adanya pengkalkulasian menurut lapangan pekerjaan akan mempermudah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor

ini.

Berdasarkan data Tabel 7 sektor yang masih dominan adalah sektor perdagangan memegang angka sebanyak 27,6 persen. Hal ini melihat bahwa provinsi Bali terkenal dengan pariwisatanya. Selanjutnya sektor pertanian tetap memegang peranan penting, khususnya bagi pembangunan daerah. Angka kedua yang tidak kalah besarnya jika di bandingkan sektor pariwisata yaitu sebesar 25,2 persen.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan, artinya melanjutkan apa yang telah dibangun, membangun

yang belum dibangun dan menambah bagian bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan pada periode lima tahun sebelumnya, maka untuk memelihara serta melanjutkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan dimaksud demi mencapai masyarakat daerah yang maju, mandiri, damai dan sejahtera, perlu ditetapkan Visi – Misi Pembangunan yang hendak dilaksanakan dalam periode lima tahun kepemimpinan pasangan yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut.

Tujuan pembangunan saat ini mengarah pada MDGs (Millennium Development Goals) yaitu mencakup 8 butir permasalahan seperti menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Bila dilihat dari kondisi kemiskinan, tingkat kemiskinan di Bali selama enam tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada maret 2013 tingkat kemiskinan di Bali mencapai 3,95 persen, turun sebesar 0,23 persen jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Maret 2012. Penurunan ini menyatakan bahwa ada perubahan pada garis kemiskinan di Bali. Penentuan garis kemiskinan dapat dilihat melalui nilai pengeluaran yang di butuhkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang selanjutnya ditentukan berdasarkan posisi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap garis kemiskinan.

Seperti diketahui bahwa Bali tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi. Perekonomian Bali lebih didukung oleh sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata serta ekonomi kreatif yang merupakan multiplier effect dari pesatnya pertumbuhan pariwisata. Selama tahun 2012 lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65 persen. Selain industri pariwisata yang semakin berkembang pesat, realisasi sejumlah pembangunan infrastruktur juga turut memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Terlebih jelang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Summit pada Oktober 2013. Data PDRB Bali tahun 2012 menunjukkan lebih dari 65 persen aktivitas ekonomi Bali dipengaruhi oleh industri pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serasat jasa-jasa), dan lebih dari 80 persen dipengaruhi oleh ekspor.

Pembahasan

Variabel Umur dan Jenis kelamin mendorong pembangunan daerah Provinsi Bali dilihat melalui perubahan komposisi penduduk dimana sebelumnya angka balita meningkat bergeser pada usia produktif pada kisaran umur 35-39 tahun. Hal ini tentunya akan menunjukkan pentingnya perhatian pemerintah bagi golongan usia ini agar memperluas lapangan serta kesempatan kerja, karena pada akhirnya ini akan mendukung kondisi perekonomian Bali agar lebuah maju.

Variabel Lapangan usaha mendorong pembangunan daerah provinsi Bali. Perubahan lapangan usaha yang sebelumnya berada pada sektor pertanian kini bergeser kea sektor pariwisata. Tentunya hal ini akan membuat arah kebijakan pemerintah provinsi Bali di fokuskan dalam bidang Pariwisata. Melihat cakupan bidang Pariwisata seperti perdagangan, perhotelan, jasa serta pengangkutan maka pemerintah dapat memberikan izin operasional pramuwisata dan penyelenggaraan wisata nusantara seperti maskapai, hotel dan

restoran, agen perjalanan serta tourism interest. Adanya hal ini di tujukan untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi Bali yang mengarah pada dunia Pariwisata.

Variabel Jenis Pekerjaan mendorong pembangunan daerah Provinsi Bali. Perubahan jenis pekerjaan yang sebelumnya berada pada jenis pekerja usaha Pertanian, Kehutanan, peternakan dan Perikanan. Berganti ke dalam jenis pekerja tenaga produksi, operator alat-alat, angkutan dan pekerja kasar. Perubahan jenis pekerja ini tidak memberikan dampak yang menonjol, karena pada intinya tenaga pekerja ini tergolong pekerja tidak terampil. Jenis pekerja pada kelompok ini diasumsikan memiliki produktivitas paling rendah.

Variabel Status Pekerjaan mendorong pembangunan daerah Provinsi Bali. Namun di Provinsi Bali tidak mengalami perubahan status pekerjaan, masih sektor informal . Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. elastisitas dari sektor ini terus eksis meskipun nilai tambah yang diciptakannya tidak sebesar nilai tambah sektor formal. Pada umumnya sektor ini akan tetap jauh lebih banyak yang menggelutinya jika di bandingkan dengan sektor formal, karena pada dasarnya mereka yang pada pada mulanya berkeinginan bekerja di sektor formal pada akhirnya bermuara di sektor formal. Hal ini bisa saja terkendala karena pendidikan, kesempatan kerja, serta umur.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan serta penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa umur jenis kelamin dan lapangan usaha mendorong pembangunan daerah di Provinsi Bali. Perubahan tersebut menyatakan bahwa arah pembangunan yang dapat di ambil bagi kebijakan yang akan diterapkan menyesuaikan dengan kondisi penduduk atau masyarakatnya. Sedangkan untuk jenis pekerjaan dan status pekerjaan tidak mengalami perubahan yang berarti, karena dalam beberapa kurun waktu golongan ini masih tetap menjadi

bagian dari masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adieutomo, Sri Moertiningsih., dan Omas Bulan Samosir. (2010). *Dasar-dasar Demografi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Ananta, Aris. (1993). *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- BPS Provinsi Bali. (2007). *Angkatan Kerja Provinsi Bali : keadaan angkatan kerja di Provinsi Bali*. Bali: BPS Provinsi Bali
- BPS Provinsi Bali. (2010). *Bali dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali
- Headey, Derek D., and Andrew Hodge. (2009). *The Effect of Population Growth on Economic Growth: A Meta-Regression Analysis of the Macroeconomic Literature*. *Population and Development Review*, Volume 35 issue 2 pp 221-447.
- Howden, M. Lindsay., and Julie A. Meyer. (2011). *Age and Sex Composition 2010: 2010 Census Briefs*. Bureau: United States Departement of Commerce
- Little, Jane Sneddon., and Robert K. Triest. (2013). *Seismic Shifts : The economic Impact of Demographic Change an Overview*. Boston: Federal Reserve Bank.
- Mahadi, Syed Abdul Razak Sayed . (2013). *Perubahan Struktur umur penduduk : impak dan cabaran kepada pembangunan Negara*. Malaysia: Fakultas Sastra dan Sains Sosial.
- Marhaeni, A.A.I.N ., dan Dewi I.G.A Manuati. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mursa, Gabriel Claudiu. (2012). *Scarcity and Population A Non-Malthusian Point of View*. *Procedia - Social of Behavioral Science*, Vol 62 pp 1115-1119.
- Rahyuda, I Ketut ., I Gusti Murjana Yasa ., dan Ni Nyoman Yuliarmi. (2004). *Metodologi Penelitian*. Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Setiawina, Nyoman Djinar., dan Arya Dwiandana Putri. (2013). *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol II.No.4.April : 173-180. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Schneider. et al. (2011). *Impacts of Population Growth, Economic Development and Technical Change on Global Food Production and Consumption*. *Agricultural System*, Vol 104 pp 204-215.
- Sopari, Asep. (2013). *Gender dan Kependudukan serta implikasinya dalam pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Supartoyo. et al. (2013). *The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of In-*

- donesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Hal 4-18
- Susilo, Kasru. (2013). Kebijakan pengembangan Wilayah di Masa yang akan datang dan implikasinya terhadap Kebutuhan Analisis dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis. Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Van Braeckel. et al. (2012). Slowing Population Growth for Wellbeing and Development. The Lancet, Volume 380, Issue 9837.